

Peran Pemerintah Kota Dalam Menanggulangi Stunting Di Kota Bontang (Studi Kasus Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara)

Afifah Nur Zahrah¹, Wahid Abdulrahman²

Email: nurzafifah4@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penanggulangan stunting merupakan agenda prioritas nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menuntut komitmen responsif dari pemerintah daerah. Kota Bontang, sebagai pusat industri dengan kapasitas fiskal besar, masih menghadapi fluktuasi prevalensi stunting, di mana Kelurahan Loktuan konsisten mencatat akumulasi kasus balita stunting tertinggi, yakni sebanyak 213 balita pada Juni 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Pemerintah Kota Bontang dan Kelurahan Loktuan dalam menanggulangi stunting melalui dimensi fungsi regulator, dinamisator, dan fasilitator, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya di lapangan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci (Dinas Kesehatan, DP3AKB, Pemerintah Kelurahan, Puskesmas, dan Kader Posyandu) serta dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*verification*) model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator berjalan optimal melalui penguatan regulasi lokal, sementara peran sebagai dinamisator menjadi dimensi paling efektif melalui mobilisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan industri sekitar untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Namun, peran sebagai fasilitator masih menghadapi hambatan berupa birokrasi, kurangnya gedung posyandu permanen, dan program pemberian makanan tambahan yang bersifat temporer. Meskipun terdapat kendala, intervensi kolaboratif ini berhasil menurunkan angka prevalensi stunting di Kelurahan Loktuan secara progresif dari 24,14% menjadi 15,74%.

Kata kunci: peran pemerintah, penanggulangan stunting, teori peran, kelurahan loktuan, kolaborasi lintas sektor.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Stunting reduction is a national priority agenda based on Presidential Regulation Number 72 of 2021, which demands a responsive commitment from regional governments. Bontang City, as an industrial center with a large fiscal capacity, still faces fluctuations in stunting prevalence, with Loktuan Village consistently recording the highest accumulation of stunted toddler cases, namely 213 toddlers in June 2025. This study aims to analyze in depth the roles of the Bontang City Government and Loktuan Village in overcoming stunting through the dimensions of regulator, dynamizer, and facilitator functions, as well as to identify the supporting and inhibiting factors of its implementation in the field. Using a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews with key stakeholders (Health Office, DP3AKB, Village Government, Community Health Center, and Posyandu Cadres) and analyzed using the data reduction, data display, and conclusion drawing (verification) stages of the Miles and Huberman model. The results show that the government's role as a regulator runs optimally through the strengthening of local regulations, while the role as a dynamizer is the most effective dimension through the mobilization of Corporate Social Responsibility (CSR) funds from surrounding industrial companies to overcome local budget constraints. However, the role as a facilitator still faces obstacles in the form of bureaucracy, a lack of permanent posyandu buildings, and supplementary feeding programs that are temporary in nature. Despite these constraints, this collaborative intervention successfully reduced the stunting prevalence rate in Loktuan Village progressively from 24.14% to 15.74%.

Keywords: role of government, stunting reduction, role theory, loktuan village, cross-sector collaboration.

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) mendefinisikan stunting merupakan kondisi anak dibawah usia lima tahun yang memiliki perbandingan yang tidak sebanding dengan dengan umurnya. Stunting berdampak pada terganggunya pertumbuhan kognitif dan intelektual anak. Anak yang mengalami kondisi ini umumnya menunjukkan penurunan daya pikir dan kemampuan belajar, yang dapat memengaruhi pencapaian akademik serta perkembangan mental secara menyeluruh. Di samping itu, stunting juga meningkatkan risiko munculnya berbagai masalah

kesehatan dan bahkan dapat berujung pada kematian pada usia dini (Saiful Anwar, 2022). Dampak stunting terhadap kesehatan dan tumbuh kembang sangat merugikan karena dapat mengakibatkan gangguan dalam tumbuh kembang anak terutama pada anak usia dibawah dua tahun. Selain itu, anak stunting juga memiliki resiko yang lebih besar untuk menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas dan penyakit jantung bawaan pada saat dewasa (Kemenkes RI, 2018).

Penanggulangan stunting merupakan agenda prioritas nasional di Indonesia yang

diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kebijakan ini menuntut komitmen nyata dan responsif dari pemerintah daerah untuk menerjemahkan strategi nasional ke dalam intervensi yang menasar langsung kelompok sasaran. Kota Bontang, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri besar di Kalimantan Timur dengan kapasitas fiskal daerah yang mumpuni, secara paradoks masih menghadapi tantangan serius berupa fluktuasi prevalensi stunting.

Dalam buku Kecamatan Bontang Utara Dalam angka (2025) tercatat bahwa secara demografis Kecamatan Bontang Utara adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling padat di Kota Bontang. Hal ini karena di kecamatan ini terdapat Kelurahan Loktuan yang menjadi kelurahan dengan penduduk terbanyak 24 ribu jiwa. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan beberapa dampak seperti tingkat stunting balita, kepadatan penduduk akibat urbanisasi, serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang kurang. Masalah ini terlihat jelas di Kelurahan Loktuan, kawasan pesisir sekaligus area penyangga industri, yang secara konsisten mencatat akumulasi kasus balita stunting tertinggi di Kota Bontang, yakni mencapai 213 balita pada Juni 2025.

Angka 213 balita ini diperoleh dari hasil Operasi Timbang dan pemantauan lapangan oleh kader kesehatan beberapa waktu sebelum Agustus 2025. Ketika data tersebut dikompilasi oleh Dinas Kesehatan, ditemukan fakta bahwa dari total 1.219 balita stunting se-Kota Bontang, Kelurahan Loktuan menyumbang angka tertinggi. Kondisi inilah yang mendasari keputusan Wali Kota dan Dinas Kesehatan untuk menjadikan Loktuan sebagai prioritas utama atau Lokasi utama intervensi program PMT.

Tingginya angka tersebut menjadi bukti adanya jarak antara kemampuan ekonomi daerah yang besar dengan kenyataan pelaksanaan program kesehatan di tingkat bawah. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, keberhasilan atau kegagalan penanggulangan masalah publik seperti stunting sangat dipengaruhi oleh kualitas peran yang dijalankan oleh birokrasi lokal.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, pengorganisasian program kesehatan publik membutuhkan kehadiran optimal dari aparat birokrasi lokal. Untuk membedah dinamika tersebut, M. Ryaas Rasyid (2000) menguraikan bahwa peran pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setidaknya terbagi ke dalam tiga dimensi utama, yaitu fungsi pemerintah sebagai regulator, dinamisor, dan

fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah bertugas menyusun kepastian hukum dan pedoman agar jalannya program lebih terarah; sebagai dinamisator, pemerintah dituntut mampu menggerakkan partisipasi multipihak serta memelihara motivasi pembangunan; sedangkan sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi tersedianya sarana, prasarana, serta permodalan yang kondusif bagi masyarakat. Melalui ketiga fungsi tersebut, proses pelaksanaan program penanggulangan stunting dapat dikaji secara lebih luas dan mendalam melihat sejauh mana responsivitas birokrasi lokal dalam mengelola isu stunting.

Meskipun berbagai intervensi telah diluncurkan oleh Pemerintah Kota Bontang dan Kelurahan Loktuan, fakta di lapangan menunjukkan adanya tarik-menarik antara faktor pendukung dan penghambat. Di satu sisi, lingkungan implementasi di Kelurahan Loktuan diuntungkan oleh keberadaan perusahaan industri raksasa di sekitarnya yang membuka peluang mobilisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai instrumen pendukung anggaran daerah. Namun di sisi lain, fungsi fasilitasi pemerintah masih mengalami beberapa hambatan birokrasi. Menurut Mustari (2020) mengatakan bahwa adanya kolaborasi multi-aktor, termasuk CSR, memperkuat koordinasi lintas sektor,

diversifikasi sumber pendanaan, dan monitoring partisipatif. Hal ini memastikan keberlanjutan program edukasi gizi berbasis komunitas. Maka dengan adanya kerjasama lintas sektor dengan CSR perusahaan sekitar menjadi jalan keluar pada penanggulangan stunting di Kelurahan Loktuan.

Mengingat pentingnya keterpaduan peran birokrasi dan dukungan lingkungan strategis dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran konkret Pemerintah Kota Bontang dan Kelurahan Loktuan dalam mengoptimalkan potensi kemitraan serta mengatasi berbagai hambatan struktural yang ada di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan stunting. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan kondisi riil di lapangan secara holistik. Penelitian berlokasi di Kelurahan Loktuan, Kota Bontang, yang dipilih secara sengaja (*purposive*) karena merupakan wilayah dengan akumulasi kasus balita stunting tertinggi.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dengan para pemangku kepentingan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan penelitian meliputi perwakilan Dinas Kesehatan Kota Bontang, DP3AKB, Pemerintah Kelurahan Loktuan, Puskesmas Bontang Utara II, Kader Posyandu, serta keluarga penerima manfaat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, seperti laporan aplikasi *e-PPGBM* dan dokumen regulasi terkait penanggulangan stunting di Kota Bontang.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Selanjutnya, seluruh data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan (*Verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dalam Menurunkan Angka Stunting di Kelurahan Loktuan

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Berdasarkan analisis Teori Peran menurut M. Ryaas Rasyid, peran Pemerintah Kota Bontang

melalui Kelurahan Loktuan dalam menanggulangi stunting telah berjalan optimal pada dimensi regulasi, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwali) No. 40 Tahun 2024 sebagai landasan hukum percepatan penurunan stunting terintegrasi. Kebijakan makro ini diimplementasikan secara taktis di lapangan melalui pelaksanaan "Operasi Timbang" Jilid 1 dan 2 pada tahun 2025 untuk memetakan status gizi balita secara berkala, serta didukung oleh digitalisasi data melalui aplikasi *e-PPGBM* Dinas Kesehatan agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran (*by name, by address*). Selain itu, ketegasan fungsi pengaturan ini juga terlihat dari adanya standarisasi klasifikasi distribusi bantuan logistik gizi yang dibagi secara ketat menjadi tiga kategori, yaitu PMT Penyuluhan untuk seluruh balita yang hadir, PMT Pemulihan/Lokal berbasis pangan lokal bagi balita dengan indikasi masalah gizi, serta pemberian susu formula khusus (PKMK) berdasarkan resep Dokter Spesialis Anak untuk balita yang telah divonis stunting.

2. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Meskipun fungsi pengaturan dan penggerak berjalan sangat masif, pemerintah masih menghadapi tantangan pada fungsi fasilitator yang dinilai belum optimal akibat keterbatasan kapasitas fiskal. Pemerintah memang telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK BOK) dari Kemenkes untuk PMT lokal, memfasilitasi alat ukur antropometri digital dan laptop untuk kader, serta membantu pembuatan BPJS bagi warga prasejahtera. Namun, hambatan birokrasi menyebabkan beberapa posyandu di Loktuan hingga kini belum memiliki gedung permanen mandiri dan terpaksa menumpang di teras rumah warga atau masjid. Selain itu, bantuan PMT dari pemerintah seringkali dirasa temporer dan intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih dan pembangunan *septic tank* di wilayah pesisir padat penduduk seperti Selambai belum terealisasi secara merata. Walau demikian, berkat anomali kolaborasi di mana fungsi dinamisator (dana CSR swasta dan militansi kader) mampu menambal keterbatasan fungsi

fasilitator, Kelurahan Loktuan berhasil mencatatkan penurunan angka prevalensi stunting yang signifikan hingga menyentuh angka 15% pada tahun 2025.

3. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Di sisi lain, fungsi pemerintah sebagai dinamisator atau penggerak tampil sangat dominan dan elastis, bahkan menjadi katup penyelamat di tengah keterbatasan birokrasi anggaran daerah. Pemerintah melalui DP3AKB berhasil memobilisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari unsur tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB untuk melakukan pendampingan intensif secara *door-to-door* pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Tidak hanya itu, fungsi penggerak ini juga diwujudkan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta di kawasan industri Loktuan, seperti PT Pupuk Kaltim (PKT) dan PT Kaltim Daya Mandiri (KDM) melalui program inovatif PEDALGAS yang menyalurkan PMT pemulihan, edukasi pola asuh, pemberian kupon belanja, hingga bantuan sarana posyandu. Untuk mengatasi rendahnya partisipasi

masyarakat, para kader di lapangan secara militan menerapkan strategi *sweeping* atau kunjungan langsung ke rumah warga yang mangkir, serta membagikan berbagai souvenir menarik dan mengadakan arisan posyandu demi mendongkrak tingkat kunjungan balita.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Stunting di Kelurahan

Pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kelurahan Loktuan didukung oleh komitmen kebijakan yang kuat melalui Peraturan Walikota (Perwali) No. 40 Tahun 2024 serta langkah taktis "Operasi Timbang" Jilid 1 dan 2 pada tahun 2025 yang memberikan kepastian hukum di tingkat kelurahan. Faktor pendukung utama lainnya adalah kemitraan strategis dengan sektor swasta, seperti PT Pupuk Kaltim (PKT) dan PT Kaltim Daya Mandiri (KDM) lewat program PEDALGAS yang menyalurkan PMT pemulihan, edukasi pola asuh, kupon belanja, hingga bantuan sarana posyandu. Keberhasilan ini juga ditopang oleh militansi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader posyandu yang aktif melakukan pendampingan *door-to-door* pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta menerapkan inovasi lapangan seperti strategi *sweeping*, pembagian souvenir, dan arisan posyandu demi

mendongkrak partisipasi warga. Selain itu, digitalisasi melalui aplikasi e-PPGBM turut memudahkan kader memantau data balita secara *by name, by address* sehingga distribusi bantuan logistik gizi dapat tersalurkan secara tepat sasaran sesuai klasifikasi kebutuhan balita.

Di sisi lain, program ini masih menghadapi beberapa faktor penghambat struktural, seperti keterbatasan kapasitas fiskal dan hambatan birokrasi anggaran daerah yang menyebabkan bantuan intervensi spesifik (PMT dari pemerintah) cenderung bersifat temporer atau berjangka pendek. Keterbatasan anggaran ini juga berdampak pada aspek sarana dan prasarana fisik, di mana beberapa posyandu di Loktuan hingga kini belum memiliki gedung permanen mandiri dan terpaksa menumpang di teras warga atau masjid. Selain itu, intervensi sensitif lingkungan seperti pembangunan *septic tank* yang layak dan penyediaan akses air bersih di wilayah pesisir padat penduduk, khususnya Selambai, belum terealisasi secara merata, serta masih rendahnya kesadaran sebagian orang tua yang mangkir hadir ke posyandu. Walau demikian, berkat anomali kolaborasi di lapangan, kendala anggaran dan fasilitas fisik tersebut berhasil ditutupi secara responsif oleh kekuatan kemitraan swasta dan militansi kader di lapangan sehingga prevalensi stunting di Loktuan tetap mampu

turun signifikan hingga 15% pada tahun 2025.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Bontang dan Kelurahan Loktuan dalam menanggulangi stunting telah berjalan secara kolaboratif melalui tiga fungsi utama. Peran sebagai regulator berjalan optimal dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024, sementara peran sebagai dinamisor menjadi dimensi paling efektif berkat keberhasilan memobilisasi dana CSR dari perusahaan industri sekitar untuk menutupi keterbatasan anggaran daerah. Namun, peran sebagai fasilitator masih terhambat oleh masalah birokrasi, keterbatasan gedung Posyandu, dan program PMT yang bersifat temporer. Meski dihadapkan pada kendala tersebut, intervensi lintas sektor ini terbukti memberikan dampak riil yang signifikan, ditandai dengan penurunan prevalensi stunting di Kelurahan Loktuan dari 24,14% menjadi 15,74%.

SARAN

Dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Bontang dan Kelurahan Loktuan adalah segera mengoptimalkan peran fasilitator dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur fisik gedung Posyandu yang permanen dan layak di Kelurahan Loktuan. Selain itu,

pemerintah daerah perlu menyusun regulasi atau skema kerja sama jangka panjang bersama perusahaan mitra CSR agar program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal tidak lagi bersifat temporer, melainkan berkelanjutan dan terintegrasi dengan edukasi pola asuh bagi keluarga rawan stunting. Terakhir, simplifikasi alur birokrasi dan peningkatan kapasitas kader posyandu secara berkala perlu terus dilakukan demi menjaga keberlanjutan tren penurunan stunting ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., Winarti, E., & Sunardi, S. (2022). *Systematic review faktor risiko, penyebab dan dampak stunting pada anak. Jurnal Ilmu Kesehatan, 11*(1), 5-6.
- Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2025). Hasil operasi timbang 2025: Jumlah balita stunting di tiap kelurahan.
- Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2025). *Kecamatan Bontang Utara dalam angka 2025*. BPS Kota Bontang. Vol.34, hal.35
- Dinas Kesehatan Kota Bontang. (2023–2025). Laporan Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). Bontang: Dinkes Kota Bontang.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Situasi balita pendek (stunting) di Indonesia, 2*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage
- Mustari, N. (2020). *Kolaborasi multi-aktor dalam pencegahan stunting*

berbasis komunitas. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(1), 45–53.

Pemerintah Kota Bontang. (2024). *Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penanganan Stunting sebagai Program Prioritas*.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, 3-4.

Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.